

Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Berbasis Komputer bagi Kepala Sekolah Penerima Dana BOS di Kota Bandar Lampung

Kurniawan Saputra dan Nurmala

Program Studi Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Lampung
Jl. Soekarno Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung
e-mail : Kurniawan_polinela@yahoo.co.id

ABSTRACT

The increase in unit cost of BOS in the year 2009 is significant evidence of government commitment in carrying out the mandate of the Constitution regarding the 20% budget for education. The commitment of this government must also be followed by increased government commitment and community participation in monitoring programs and funding. Based on this, the in-depth knowledge of Microsoft Office is required by the school principal and the school treasurer. It is necessary to an understanding of Microsoft Office that includes: Ms Excel. The aim is for school principals and treasurers to process data based computer applications in accounting / finance, especially financial management BOS to BOS with the orderly administration implemented, transparent, accountable, efficient, timely, and avoid deviations.

Keyword : Accounting, BOS

ABSTRAK

Peningkatan biaya satuan BOS pada tahun 2009 adalah bukti yang signifikan dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanat konstitusi tentang anggaran 20% untuk pendidikan. Komitmen pemerintah ini juga harus diikuti dengan peningkatan komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam program monitoring dan pendanaan. Berdasarkan hal ini, pengetahuan yang mendalam tentang Microsoft Office diperlukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Hal ini diperlukan untuk memahami Microsoft Office yang meliputi: Ms Excel. Tujuannya adalah untuk kepala sekolah dan bendahara untuk mengolah data aplikasi komputer yang berbasis di akuntansi / keuangan, manajemen BOS terutama keuangan untuk BOS dengan tertib administrasi dilaksanakan, transparan, akuntabel, efisien, tepat waktu, dan menghindari penyimpangan.

Kata Kunci: Akuntansi, BOS

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dalam rangka penyelenggaraan strategi peningkatan pelayanan pendidikan maka pemerintah daerah kabupaten dan kota dapat melakukan

upaya-upaya yaitu : (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan. (3) Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. (4) Meningkatkan anggaran pendidikan.

Demi terwujudnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maka pemerintah mempunyai program BOS. Sumber dana program BOS berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan yang meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Selain itu ada ketentuan teknis lain yang bersifat mempertegas dan memperjelas pelaksanaannya. Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2009 APK SMP telah mencapai 98,11%, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajib 9 tahun telah

tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar.

Peningkatan biaya satuan BOS pada tahun 2009 yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan. Komitmen pemerintah ini harus juga diikuti oleh peningkatan komitmen pemerintah daerah serta peran serta masyarakat

dalam pengawasan program dan pendanaan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 semakin memperjelas jenis-jenis dana pendidikan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Demikian juga kebijakan program buku murah Kementrian Pendidikan Nasional yang dimulai tahun 2008, akan menjadi salah satu acuan utama program BOS tahun 2010.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengetahuan yang mendalam mengenai Microsoft office sangat diperlukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Untuk itu perlu pemahaman mengenai Microsoft office yang meliputi : Ms Excell. Tujuannya adalah agar kepala sekolah dan bendahara sekolah dapat menjalankan excel dengan mahir, dapat menggunakan fasilitas yang ada di Ms. Excel diantaranya penggunaan formula dan fungsi untuk mengolah dana BOS, mengedit data workbook, memformat angka, teks dan data, dapat menampilkan data dana BOS dalam bentuk tabel dan grafik. Selain itu tujuannya adalah agar kepala sekolah

dan bendahara sekolah dapat mengolah data aplikasi komputer berbasis akuntansi/keuangan khususnya dana BOS sehingga pengelolaan keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

2. METODE

Penulisan dilakukan dengan mengumpulkan data penggunaan dana BOS, mengolah data dana BOS dengan menggunakan Ms. Excel, menyajikan laporan pengelolaan dana BOS yang berbasis komputer serta menganalisis data dana BOS baik dalam bentuk laporan pengelolaan, tabel maupun grafik sehingga dapat memberi gambaran yang jelas tentang penggunaan dana BOS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Microsoft Excel, Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan

grafik dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan *administrative* mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Permasalahan sederhana tersebut misalnya membuat rencana kebutuhan barang meliputi nama barang, jumlah barang dan perkiraan harga barang. Permasalahan ini lebih mudah diselesaikan dengan Microsoft Excel. Dalam pembuatan laporan keuangan yang memerlukan banyak perhitungan manajemen data dengan menampilkan grafik atau pivot tabel atau penggunaan fungsi-fungsi matematis ataupun logika pada sebuah laporan. Penyelesaian permasalahan yang kompleks juga dapat memanfaatkan pemrograman macro yang disediakan oleh excel agar proses penggunaan lebih mudah.

Dalam penyusunan laporan keuangan dana BOS, Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah menggunakan Ms. Excel. Ms. Excel sangat diperlukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah dalam menyusun pembuatan laporan keuangan dana

BOS. Untuk itu perlu diadakannya semacam pelatihan Microsoft office yang meliputi Ms. Excel yang memerlukan pemahaman Aplikasi Komputer Berbasis Keuangan.

Bukti Pengeluaran, (1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah. (2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,- tidak dikenakan bea materai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp. 3000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp. 1.000.000,- dikenakan bea materai dengan tariff Rp. 6.000,-. (3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya. (5) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi. (6) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala

Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara. (7) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh sekolah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Pelaporan, Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS. Untuk itu laporan pertanggungjawaban harus memenuhi unsur-unsur yaitu : (1) Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya. (2) Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. (3) Laporan penggunaan dana BOS dari penanggungjawab/pengelola dana BOS di tingkat sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Kota beserta dokumen pendukungnya diarsipkan di sekolah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penggunaan dana BOS tersebut,

maka dapat dilihat hasil pengolahan data dalam MS. Excel berikut ini :

BUKU KAS BOS Januari 2007

PENERIMAAN				PENGELUARAN			
No. Bukti	Tanggal	Uraian	Jumlah	No. Bukti	Tanggal	Uraian	Jumlah
Saldo akhir bulan : Desember 2006			0				
11	1/1/bos/07	02-Jan-07	Terima Dana BOS Periode Bulan Jan-Mar 2007	2/1/bos/07	03-Jan-07	Dibayar Honor GTT dan Pegawai	2.375.000
12	6/1/bos/07	06-Jan-07	PPH 21	3/1/bos/07	04-Jan-07	Dibayar langganan listrik	725.600
13	8/1/bos/07	07-Jan-07	PPH 22	4/1/bos/07	05-Jan-07	Dibayar langganan telpon	975.400
14				5/1/bos/07	06-Jan-07	Dibayar Tugas tambahan guru sbg Wali Kelas	2.200.000
15				7/1/bos/07	07-Jan-07	Dibayar Belanja ATK ke Toko "AAA"	4.700.000
16				9/1/bos/07	08-Jan-07	Dibayar langganan surat kabar	84.000
17				10/1/bos/07	09-Jan-07	Dibayar Pembelian Gula kopi ke toko "BBB"	100.000
18				11/1/bos/07	31-Jan-07	PPH 21	330.000
19				12/1/bos/07	31-Jan-07	PPH 22	427.300

Gambar 1. Laporan Buku KAS

A	B	C	D	E	F
1				FORMAT BOS K-4	
2				Diisi oleh Bendahara/Guru Sekolah	
3				Disimpan di Sekolah	
4				BUKU PEMBANTU KAS TUNAI	
5				BOS	
6				Periode : Bulan Januari 2007	
7	Nama Sekolah	:		
8	Desa/Kecamatan	:		
9	Kabupaten	:		
10	Propinsi	:		
11					
12	No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
13					Saldo
14	Saldo s.d Akhir Bulan Desember-2006				
15					
16	1	02-Jan-07	Terima Dana BOS Periode Bulan Jan-Mar 2007	45.306.000	Rp 45.306.000
17	2	03-Jan-07	Dibayar Honor GTT dan Pegawai		Rp 2.375.000
18	3	04-Jan-07	Dibayar langganan listrik		Rp 725.600
19	4	05-Jan-07	Dibayar langganan telpon		Rp 975.400
20	5	06-Jan-07	Dibayar Tugas tambahan guru sbg Wali Kelas		Rp 2.200.000
21	6	06-Jan-07	PPH 21	330.000	Rp 39.360.000
22	7	07-Jan-07	Dibayar Belanja ATK ke Toko "AAA"		Rp 4.700.000
23	8	07-Jan-07	PPH 22	427.300	Rp 35.087.300
24	9	08-Jan-07	Dibayar langganan surat kabar		Rp 84.000
25	10	09-Jan-07	Dibayar Pembelian Gula kopi ke toko "BBB"		Rp 100.000
26	11	31-Jan-07	PPH 21		Rp 330.000
27	12	31-Jan-07	PPH 22		Rp 427.300
28					
29					
30					
31	Jumlah akhir bulan : Januari 2007			Rp 46.063.300	Rp 11.917.300
32					
33	SALDO BULAN INI				Rp 34.146.000

Gambar 2. Laporan Buku Pembantu KAS Tunai

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diberikan kesimpulan yaitu : (1) Kepala sekolah dan bendahara sekolah dapat membuat laporan bulanan dan tahunan yang dapat menggambarkan tentang keadaan pendidikan yang terjadi setiap tahunnya, sehingga pihak Dinas P & K dapat terbantu dalam membuat laporan penggunaan dana BOS yang akan dilaporkan ke Pemerintah Pusat. (2) Pengelolaan administrasi keuangan Bantuan Operasional Sekolah dengan menggunakan Microsoft excel ini merupakan proses kerja bagi Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Panduan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2007, Departemen Pendidikan Nasional.

Depdiknas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Direktoral Pendidikan Menengah Umum. 2007. *Pemberian Block*

Grant Pendidikan Menengah Umum. Jakarta.

....., 2001. Buku I Konsep dan Pelaksanaan. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta.

.....,2002. Depdiknas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah : *Dana Bantuan Langsung Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah/Madrasah*. Jakarta.

....., 2007. Depdiknas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum. *Pemberian Block Grant Pendidikan Menengah Umum tahun Anggaran 2007*. Jakarta.